

ISSN-E: 2623-2065
ISSN-P: 2684-8872

SINDANG

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2020)

Eksistensi Tradisi Masyarakat Samin Kabupaten Bojonegoro Pada Era Modern

Agus Danugroho

Kritik Terhadap Pemikiran Kontroversial Bercorak Panteistik dalam Karya Syaikh Abdus Samad Al-Palimbani Abad ke-18

Arafah Pramasto

Perkembangan PGRI pada Masa Kemerdekaan dan Demokrasi Liberal

Efriansyah, Yunani Hasan, Aulia Novemy Dhita

Penggunaan Model *Inside Outside Circle* Terhadap Hasil Belajar Sejarah Indonesia pada Materi Kerajaan Sriwijaya

Yuli Agustina, Isbandiyah, Agus Susilo

Hubungan Sriwijaya dengan Dinasti Umayyah Terhadap Masuknya Agama Islam di Palembang pada Abad VIII Masehi

Wandiyo, Ida Suryani, Kabib Sholeh

Situs Duplang: Pembelajaran Berbasis Multimedia Animasi Interaktif di SMA dalam Perpektif Sejarah Lokal

Abdus Samad, Wewin Hartanto, Rully Putri Nirmala Puji

Perubahan Kurikulum di Awal Era Reformasi (2004-2006) dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Nasional

Andina Dea Saffina, Farid Fajar Muzaki, Mikhael Zonasuki Simatupang

Pendidikan Xaverius pada Masa Belanda di Indonesia

Andika Juliansyah, Aditya Roll Asmi, Aulia Novemy Dhita

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Talking Stick* untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar IPS (Sejarah) Siswa Kelas VII 6 SMP Negeri 7 Denpasar

Rulianto dan Ida bagus Nyoman Wartha

Efektivitas Model Pembelajaran *Inquiry* Terhadap Hasil Belajar IPS

Sherly Triana Angelica Putry, Isbandiyah, Andriana Sofiarini



Dewan Redaksi

SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

Editor in Chief

Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Section Editor

Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Guest Editor

Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya)

Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

Reviewer/Mitra Bestari

Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan)

Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran)

Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

Administrasi

Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2020)

| | Halaman |
|---|---------|
| Dewan Redaksi | i |
| 1. Eksistensi Tradisi Masyarakat Samin Kabupaten Bojonegoro Pada Era Modern <i>Agus Danugroho</i> | 1 |
| 2. Kritik Terhadap Pemikiran Kontroversial Bercorak Panteistik dalam Karya Syaikh Abdus Shamad Al-Palimbani Abad ke-18 <i>Arafah Pramasto</i> | 8 |
| 3. Perkembangan PGRI pada Masa Kemerdekaan dan Demokrasi Liberal <i>Efriansyah, Yunani Hasan, Aulia Novemy Dhita</i> | 19 |
| 4. Penggunaan Model <i>Inside Outside Circle</i> Terhadap Hasil Belajar Sejarah Indonesia pada Materi Kerajaan Sriwijaya <i>Yuli Agustina, Isbandiyah, Agus Susilo</i> | 27 |
| 5. Hubungan Sriwijaya dengan Dinasti Umayyah Terhadap Masuknya Agama Islam di Palembang pada Abad VIII Masehi <i>Wandiyo, Ida Suryani, Kabib Sholeh</i> | 32 |
| 6. Situs Duplang: Pembelajaran Berbasis Multimedia Animasi Interaktif di SMA dalam Perspektif Sejarah Lokal <i>Abdus Samad, Wiwin Hartanto, Rully Putri Nirmala Puji</i> | 44 |
| 7. Perubahan Kurikulum di Awal Era Reformasi (2004-2006) dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Nasional <i>Andina Dea Saffina, Farid Fajar Muzaki, Mikhael Zonasuki Simatupang</i> | 52 |
| 8. Pendidikan Xaverius pada Masa Belanda di Indonesia <i>Andika Juliansyah, Aditya Roll Asmi, Aulia Novemy Dhita</i> | 63 |
| 9. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe <i>Talking Stick</i> untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar IPS (Sejarah) Siswa Kelas VII 6 SMP Negeri 7 Denpasar <i>Rulianto dan Ida Bagus Nyoman Wartha</i> | 72 |
| 10. Efektivitas Model Pembelajaran <i>Inquiry</i> Terhadap Hasil Belajar IPS <i>Sherly Triana Angelica Putry, Isbandiyah, Andriana Sofiarini</i> | 78 |

PERKEMBANGAN PGRI PADA MASA KEMERDEKAAN DAN DEMOKRASI LIBERAL

Efriansyah, Yunani Hasan, Aulia Novemy Dhita
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya
Alamat korespondensi: sultaneфри@gmail.com

Diterima: 26 November 2019; Direvisi: 20 Januari 2020; Disetujui: 30 Januari 2020

Abstract

Early education in independent Indonesia become one of the important aspects to foster the spirit of nationalism and promoting the ideals of independence of the Republic of Indonesia. Indonesian government attention newborn and some of the figures revolutionist who realized that education is very important to foster the spirit of nationalism and efforts to create awareness of an independent nation. Based on the subjects of education and new teaching drafted by the Committee of Inquiry Teaching goals and educational foundation and a system of schooling that characterizes to Indonesiaan. Organization of Indonesian Teachers Association, as a teachers Indonesian container that has been since the days of the Dutch East Indies. Since the proclamation of PGRI organization establishes itself as a fighter who helped defend the independence and sovereignty of Indonesia NKRI. This organization is a manifestation of the Indonesian teacher in taking part and responsibility in accordance with his profession as an educator for the independence aspired. The organization therefore seen as a unifier of teachers who are: 1) a unitary, 2) independent, 3) non-political. It is also a tool, a vehicle in the interests of the teachers for their professional development, education in general and devotion to the homeland and the nation.

Keywords: History of education, nationalism, Indonesian revolution, PGRI.

Abstrak

Pendidikan di awal Indonesia merdeka menjadi salah aspek penting untuk menumbuhkan semangat memperjuangan nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Perhatian pemerintah Indonesia yang baru lahir dan sebagian dari tokoh-tokoh pejuang revolusi yang sadar bahwa bidang pendidikan sangat penting untuk menumbuhkan semangat nasionalisme serta upaya untuk menanamkan kesadaran sebagai bangsa yang merdeka. Berdasarkan pokok-pokok pendidikan dan pengajaran baru oleh Panitia Penyelidik Pengajaran disusunlah tujuan dan landasan pendidikan serta sistim persekolahan yang mencirikan ke Indonesiaan. Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia, sebagai wadah para guru Indonesia yang sudah sejak masa Hindia Belanda. Sejak proklamasi organisasi PGRI menetapkan dirinya sebagai organisasi pejuang yang turut mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia NKRI. Organisasi ini merupakan manifestasi kaum guru Indonesia dalam mengambil bagian dan tanggung jawab sesuai dengan bidang profesinya sebagai pendidik untuk mengisi kemerdekaan yang dicita-citakan. karenanya organisasi ini dipandang sebagai pemersatu kaum guru yang bersifat: 1) unitaris, 2) independen, 3) non partai politik. Juga merupakan suatu sarana, wahana dalam kepentingan kaum guru bagi pengembangan profesinya, pendidikan pada umumnya serta pengabdianya kepada tanah air dan bangsa.

Kata Kunci: Sejarah pendidikan, nasionalisme, revolusi Indonesia, PGRI.

A. Pendahuluan

Usaha suatu bangsa dalam membangun dan mencerdaskan kehidupannya, maka sangat diperlukan suatu kegiatan pendidikan yang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam pribadi manusia di Indonesia. Dalam rangka menciptakan pendidikan yang tujuan nasionalnya sangat perlu diatur secara kondusif bagi perkembangan nilai-nilai edukasi dan nilai-nilai kultural oleh

pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Dalam pengembangan pendidikan harus dibenahi secara sistematis karena sebagai wadah penyaluran minat dan bakat siswa melalui pemberian ilmu pengetahuan, bimbingan, serta menerapkannya di masa datang. Sistem pendidikan harus dikembangkan secara baik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, harus ditata dan dikembangkan secara baik.

Untuk selanjutnya, memberi penjelasan secara lugas tentang karakteristik atau cirri-

ciri suatu profesi. Komponen utama dalam sistem pendidikan adalah guru dan tenaga pendidik. d keseluruhan kegiatan pendidikan pada tingkat yang oprasional, Melalui kinerja seorang guru pada tingkat institusional dan instruksional merupakan penentu keberhasilan pendidikan. Hal ini memaknai bahwa kegiatan dalam meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari aspek guru dan tenaga kependidikan lainnya, baik yang menyangkut kesejahteraannya dalam suatu manajemen pendidikan yang professional maupun kualitas profesionalnya.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis dimana melalui telaah pustaka dalam bentuk buku dan jurnal, dalam penulisan sebuah penelitian dibutuhkan adanya metode sebagai proses dan prosedur yang ditempuh untuk memperoleh suatu keabsahan dalam penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk menjawab masalah - masalah yang dihadapi dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian sejarah dengan 4 tahapan proses penelitiannya. Penelitian pertama ini menggunakan metode penelitian sejarah yakni Heuristik yang merupakan tahap pengumpulan sumber.

Metode yang kedua adalah Kritik dilakukan terhadap bahan materi (ekstern) sumber maupun terhadap substansi (isi) sumber. Metode selanjutnya adalah Interpretasi digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar faktafakta sejarah tersebut untuk dapat diceritakan secara tematis sesuai dengan tema dan sistematika penulisan. Metode yang terakhir digunakan adalah Historiografi yaitu tahap penulisan sejarah.

C. Pembahasan

PGRI Pada Masa Kemerdekaan (1945-1949)

Pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah kemerdekaan Indonesia terjadilah perubahan dalam bidang pendidikan. Perubahan ini bersifat mendasar yakni berupa penyesuaian karakteristik bangsa serta Negara merdeka, maka dalam landaasan hukumnya bidang pendidikan ini mengalami perubahan, tujuan pendidikan, system persekolahan, serta

diberikannya kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk belajar/sekolah.

Pada 25 November 1945 sesudah kemerdekaan RI PGRI pun lahir. Tahun 1912 merupakan munculnya organisasi PGRI yang pada masa itu awalnya disebut PGHB (Persatuan Guru Hindia Belanda). Setelah itu pada 20 tahun kemudian tepatnya (1932) diubah menjadi Persatu-an Guru Indonesia (PGI). Dikalangan guru - guru bangsa Indonesia telah lama tumbuh semangat kebangsaan.

Pada tanggal 17 agustus 1945, sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia Ki Hadjar Dewantara ditujuk oleh pemerintah untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pada tanggal 14 November 1945 Ki Hajar Dewantara mulai menduduki jabatannya, dan kemudian, setelah itu pada 12 maret 1946 diganti oleh Mr. T.G.S.G. Pada tanggal 12 maret 1946 sampai dengan 02 oktober 1946 diganti oleh Muhammad Sjafei. Setelah itu diganti lagi oleh Mr. Suwandi dan membuat Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia di Jogjakarta, dan diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara. Berdasarkan surat keputusan No. 60 Bhg umum, Menteri Pendiddikan Pengajaran dan Kebudayaan yang terhitung pada tanggal 12 Mei 1946 telah mengesahkan anggota penyidik pengajaran Republik Indonesia yang terdiri dari 52 anggota. Panitianya terdiri dari semua lapisan dan aliran. Tugas panitia ini untuk meninjau masalah pendidikan dan mengajarkan anak - anak usia 3 tahun hingga dewasa, bisa juga dari taman kanak - kanak sampai perguruan tinggi dengan berbagai macam jenisnya. Yang menjadi topic utama dalam rapat tersebut yaitu Soal-soal agama, budi pekerti, budaya, angkatan perang dan soal pendidikan orang dewasa. Sebagai pedoman kerja panitia menteri Suwandi telah mengambil beberapa keputusan sebagai berikut:

- a. Dalam merencanakan susunan baru untuk tiap-tiap macamsekolah adalah tugas panitia
- b. Tidak terlalu beratnya dalam

menetapkan bahan-bahan pengajaran dan menimbang keperluan yang praktis.

Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas, termasuk fasilitas, dengan disertai daftar-daftar dan keterangan-keterangan yang langsung.

Untuk menghasilkan guru maka diadakan pendidikan guru. Macam - macam pendidikannya yaitu; 4 tahun untuk sekolah Guru B kemudian menjadi guru Sekolah Rakyat, 2 tahun untuk sekolah guru C, dan 3 tahun untuk sekolah guru A.

Sekolah kejuruan berupa Pendidikan ekonomi dan ada juga pendidikan kewanita-an. Setelah Sekolah Rakyat maka lanjut 3 tahun Sekolah Dagang atau Pendidikan ekonomi. Lama sekolah 3 tahun untuk pekolah kewanita-an atau SKP (Sekolah Kepandaian Putri)serta lama sekolah 4 tahun untuk dan SGKP (Sekolah Guru Kepandaian Putri). KKN (kursus Kerajinan Negeri) termasuk pendidikan teknik. Lama sekolah teknik 2 tahun sesudah STP/SMP bagian B serta termasuk prodi bangunan gedung, bangunan air serta jalan, membangun mesin, membangun listrik, membangun radio, membangun kapal, per-cetakan, serta per-tambangan. S-T berkomitmen mendidik pengawas bangunan. Lama-pendidikan S-TM 4 tahun sesudah SMP bagian-B/ST. S-TM bertujuan men-didik ahli-teknik serta pejabat teknik-menengah.

Sekolah guru-teknik bertujuan untuk menghasilkan guru-teknik melalui sekolah-kursus uagar menghasilkan ijazah-A teknik; khusus diberikan kepada guru S-TP jurusan-bangunan B I-Teknik khusus juga diberikan guru S-TM/ST tingkat I jurusan bangunan-sipil, bangunan--gedung, mesin serta listrik. Ijazah-B II Teknik kusus diberikan kepada guru S-TM jurusan bangunansipil, bangunan-gedung sipil, bangunan-gedung, mesin serta listrik. Saat itu pendidikan pecah terbagi 2 yakni; pendidikan-tinggi RI dan Pendidikan-tinggi DPB (Daerah Pendudukan Belanda).

Tahun 1945 samapi 1949 adalah masa kemerdekaan; waktu itu masih adfanya perang/revolusi-fisik. Pendidikan mulai bisa diperbaiki oleh pemerintahan-Indonesia pada tahun 1950. Tapi kemajuan pendidikannya berjalan-lambat karena keretbatasan- SD berupa dana/tenaga/sarana. Hal ini menyebabkan perlahan/lahan rakyat ter-biasa den-gan pendidikan-yang serba asal-asalan. Asal-berjalan, asal-ada-guru, asal-ada-sekolah, dan tanpa- adanya tujuan. Tidak hanya pendidikan-formal; pendidikan-informal juga.

Tabel 1.1
Susunan Kepengurusan PGRI Kongres 1-3

| N o | Kong res | Tempat & Waktu | Ketua Umum dan Sekjen terpilih | Hasil Kongres |
|-----|--------------|----------------------------------|---|--|
| 1. | Kong res I | 24-25 Novem ber 1945. Surakar ta | Ketua: -Amin Singgih Wakil Ketua: - Rh.Koesna n -Soekitro Penulis : 1.Djajeng Soegianto 2. Alimarsaba n Bendahara : 1.Soemidi Adisasmita 2.Siswowid jojo | 1. Menetapkan nama-organisasi adalah PGRI dari pendapat-pendapar masuk. 2. Memutuskan Amin Singgih sebagai ketua-formatur. 3. Dan pasal I AnggaranDas ar per-tama ditetap-kan susunan/pen gurus besar. |
| 2. | Kong res II | Surakar ta, 27-29 Februar i 1948 | Ketua: - Rh. Koesnan Wakil Ketua: -Soejono Kromodmo eljo -Soejono Penulis : -J. Soetemas -Mh. Hoesodo Bendahara : -Soemedi Adisasmita -Dinneman | 1. Sistem Pengajaran atau Pendidikan agar dilakukn atas dasar-kepentigan nasional. 2. Supaya upah guru tdak terhentikan. 3. Di- adakannya UU pokok pendidikan/ UU- perburuhan. |
| 3. | Kong res III | Madiun , 27-29 Februar | Ketua: - Kromodmo | 1. Di- hapuskan sekolah guru- |

| | | | |
|--|--------|---|--|
| | i 1948 | eljo | c (S-GC) |
| | | Wakil Ketua: - Soedjono - Soedarsono Bendahara : Dinneman | yakni pendidikanG uru 2-tahun sesudah S-R 2. Bcnt PGRI sebagai serikat yang nyata 3. Di- terbitkan Majalah guru 4. Ikut serta wakil-PGRI Soedjono Kromodimrjo dalampanitia upah negara |

PGRI Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Pada masa Demokrasi Liberal yaitu pada tahun 1950-1959 telah terjadi beberapa Kongres PGRI yang sudah diselenggarakan antara lain yaitu kongres ke- IV sampai ke- IX.

1) KONGRES IV PGRI di Yogyakarta 26-28 Februari 1950

Pada saat itu Kongres dilaksanakan di Yogyakarta dimana kota ini pada saat itu merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Saat kongres IV ini terhitung anggota PGRI 15.000 orang yang terbagi 76 cabang dalam keanggotaan PGRI. Saat itu Mr. Assa'at merupakan pemangku penjabat atau pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia memberikan kata sambutannya dalam acara Kongres PGRI ke- IV ini. Hal-hal yang disampaikan oleh beliau adalah antara lain:

1. Persatukanlah, istilah dan sempurnakanlah makna ikrar resmi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke.
2. Mengapresiasi PGRI sebagai wadah perjuangan dan pergerakan pendidikan Indonesia dalam mamajukan pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik.
3. Menginstruksikan agar PGRI selalu berkomitmen bersama-sama dalam membangun Indonesia yang sama dengan cita-cita pendiri bangsa. (Rakhmat Hidayat, 2011: hlm.32-35)

Kata sambutan yang disampaikan oleh Mr. Assa'at merupakan harapan agar PGRI menjadi wadah dalam perjuangan dan pergerakan tenaga pendidik agar memajukan pendidikan Negara Indonesia yang belum lama merdeka.

Hasil keputusan kongres IV yaitu, sebagai berikut:

1. Menjadikan PGRI sebagai Organisasi pemersatu guru-guru Indonesia.
2. Menumbuhkan rasa semangat kedaerahan dan menghilangkan rasa curiga yang menjangkit para guru yang politik yang dapat menyebabkan disintegrasi Indonesia,
3. Maklumat Persatuan" bersisi tentang agar para guru Indonesia untuk bersatu dan tidak terpecah belah dalam menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan.

Tabel 1.2
Struktur PB PGRI Hasil Kongres PGRI

| Jabatan | Nama |
|-------------------------------|-------------------------|
| Ketua I | RH. Koesnan |
| Ketua II | Soejono |
| Ketua III | Soejono Kromodimulyo |
| Sekretaris Jendral I | Soekarno |
| Sekretaris Jendral II | Mochamad Hidayat |
| Bendahara I | Soetinah |
| Bendahara II | Soetedjo |
| Ketua Bagian Perburuhan | ME. Soebiadinata |
| Wakil Ketua Bagian Perburuhan | Soeparmo |
| Ketua Bagian Pendidikan | Soedarsono |
| Wakil Ketua Bagian Pendidikan | F. Wachendorff |

Ada beberapa peristiwa penting dalam Kongres PGRI ke IV ini, yaitu:

1. Adanya sekitar 30 cabang dari Serikat Guru Indonesia (SGI) menyatakan bergabung dengan PGRI.

2. Keputusan Pemerintah No. 16 tahun 1950 yang berisi tentang penyesuaian gaji guru yang awalnya sesuai dengan (HBBL)
3. Didirikan pendidikan sekolah bagi anak-anak pejuang.
4. Keputusan Kongres IV dan AD/ART untuk seluruh perwakilan setiap daerah, yaitu dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Lampung. Mereka agar memberi laporan tentang tanggapan guru-guru akibat "Maklumat Persatuan" agar segera di laporkan ke Jakarta.

Dibulan Februari tahun 1950, 50 cabang SGI di seluruh Negara Pasundan memutuskan untuk keluar dari SGI selanjutnya bersatu ke PGRI. Pada 1950, Pemerintah Indonesia membuat PP No. 16/1950 yang berisi guru-guru bekas daerah federal yang tadinya digaji menurut HBBL (Herziende Bezoldingsregeliflg der Bur- gelijke Landsdienaren) tahun 1938. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai yang diharapkan.

Untuk mendesak birokrasi yang sangat lamban jalannya, guru-guru di Jawa Barat mengancam untuk mengadakan pemogokan. Sikap mereka disokong oleh PB PGRI. Rencana tersebut berhasil membuat PGRI semakin kokoh dalam pergerakan organisasi yang sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950.

2) KONGRES PGRI V (19-24 Desember 1950 di Bandung)

Kongres ini memiliki dua tujuan utama yaitu pemersatuan SGI/PGI ke dalam PGRI dan untuk mendukung Lustrum PGRI 1. Dapat disebut bahwa kongres tersebut adalah "Kongres Persatuan". Maka untuk itu diusahakan agar PGRI terus memperteguh persatuan sesuai dengan AD ART PGRI.

Kembalinya Indonesia dari RIS ke NKRI mengakibatkan adanya dua golongan yang saling berseteru dan mencurigai serta perbedaan sudut pandang. Kedua golongan ini adalah golongan Cooperator dan golongan Non Cooperator. Masalah yang muncul

pertama kali adalah keselarasan gaji untuk pegawai dan pemberian apresiasi kepada golongan Non Cooperator yang terang-terangan menantang penjajah Belanda pada saat perang kemerdekaan. Dalam Kongres ini memutuskan beberapa keputusan penting dalam pemajuan pendidikan dan tanga pendidik serta kepengurusan PGRI sendiri.

Hasil dari rapat Kongres ini antara lain:

1. Mengukuhkan Pancasila sebagai Azas Organisasi.
2. Mengintuksikan agar PB PGRI menangani permasalahan gaji pegawai.
3. Memperkuat internal maupun eksternal Organisasi dengan membuat cabang-cabang kantor mengawasi di daerah.

Tabel 1.3

Struktur Pengurus Besar PGRI Hasil Kongres PGRI V

| Jabatan | Nama |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Ketua | 1. Soedjono 2. M.E. Soebandinata |
| Sekretaris Jendral | Moehamad Hidadjat |
| Sekretaris urusan perburuhan | M.E. Soebandinata |
| Sekretaris Urusan Pendidikan | Ibnu Tadjji |
| Sekretaris urusan penerangan | J.M.S. Hutagalung |
| Sekretaris urusan keuangan dan usaha | Moehamad Hidadjat |
| Komisaris umum DTU Pendidikan | F. Wachen droff |
| Komisaris umum DTU Perburuhan | Alam Sjahroeddin |
| Komisaris umum DTU Keuangan | M. Sastra Atmadja |
| Komisaris umum DTU Usaha | Soemahardja |
| Redaksi Majalah Suara Guru | J.M.S. Hutagalung dan Soedjono |

Dalam Kongres V PB PGRI terpilih untuk segera :

1. Penyamaraan gaji pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan.
2. Memberikan penghargaan golongan Non Cooperator.
3. Menuntut pemerintah agar membuat peraturan tentang gaji pegawai.

4. Konsolidasi wakil PGRI dalam penyusunan peraturan gaji pegawai
5. Evaluasi kinerja hasil Organisasi.

Hal-hal penting dalam Kongres PGRI ke V, yaitu :

- a. Mempersiapkan Lustrum PGRI berusia 5 tahun.
- b. Bersuka cita karena PGI/SGI yang melebur dalam satu naungan Organisasi PGRI

Dua hal tersebut menetapkan bahwa Kongres PGRI V merupakan Kongres Persatuan.

3) KONGRES PGRI VI (24-30 November 1952 di Malang)

Dilaksanakan di Malang. Ada ketetapan yang terdapat pada rapat kali ini yaitu:

1. Memperbaiki dan pembaharuan dalam pendidikan.
2. Melakukan verifikasi terhadap cabang organisasi PGRI, dengan ketentuan yang tidak memenuhi syarat akan dibubarkan.

Tabel 1.4
Struktur Pengurus Besar PGRI V

| | |
|---|--|
| Ketua | Soedjono M.E. Soebiandinata |
| Panitera umum | Moehamad Hidajat |
| Panitera organisasi/tata usaha | Soebahdri |
| Panitera perburuhan | Ahmad Sanoesi |
| Panitera pendidikan | Ketut Nara |
| Panitera penerangan | Soeparno |
| Panitera keuangan dan usaha | Soetardjo |
| Komisaris umum DTU Pendidikan | Slamet II |
| Komisaris umum DTU perburuhan | Alam Sjahroeddin |
| Komisaris umum DTU keuangan | Prawirosoedarsono |
| Komisaris umum DTU Pelayanan | Ningsih |
| Komisaris umum DTU perburuhan dan pendidikan wanita | NJ. S. Soemardi |
| Redaksi majalah suara guru | Soepardo, Soedjono, Soebandri |

Peristiwa yang terjadi dalam Kongres VI, yaitu :

1. Membentuk panitia konsepi pendidikan nasional Indonesia yang dipimpin oleh F.Wachen droff
2. Perwakilan PGRI dalam (BKPI).
3. Konsolidasi dan kerjasama dengan dinas maupun membahas tentang organisasi-organisasi pendidikan.
4. Dikeluarkannya Surat Keterangan Menteri PP & K Nomor. 20/G.I/C. Pada tanggal 14 Mei 1954
5. Pengutusan perwakilan dalam kepanitiaan nasional UNISCO pada tahun 1953
6. Pengangkatan kepengurusan PGRI di Bandung pada tanggal 22-27 Juli 1954
7. Disahkan pula MARS PGRI ciptaan Basoeki Endopranoto.

4) KONGRES PGRI VII (24 November - 1 Desember 1954 di Semarang)

Tabel 1.5
Struktur Kepengurusan PGRI VII

| Jabatan | Nama |
|-------------------------------|---|
| Ketua I | Soedjono |
| Wakil ketua | 1. M.E. Soebinadinata 2. Hermanoe Adi. |
| Panitra umum | Moehamad Hidajat |
| Panitera Organisasi | Soebandri |
| Panitera Perburuhan | Alamsjaroeddin |
| Panitera pendidikan | Idris M. Hutapea |
| Panitera Penerangan | Soepardo |
| Panitera Keuangan | Soetardjo |
| Komisaris umum DTU Pendidikan | Slamet II |
| Komisaris umum DTU perburuhan | N.J.S. Soenardi |

Hal-hal penting dalam Kongres ini yaitu:

- a. PGRI mendapat anggota baru yaitu ikatan guru lulusan CVO dan ikatan guru SR.
- b. Diadakanya Konfedar PGRI di beberapa cabang, yaitu Denpasar untuk wilayah Nusa Tenggara (22-25 Juli 1955) dan di tanjung Karang untuk wilayah Sumatera Selatan (11-13 Juli 1955). Akibat mulai banyaknya anggota-anggota PGRI yang

berpaham PKI yang mengganggu penerapan peraturan PGRI, yaitu Iuran di setiap cabang PGRI.

- c. Berdirinya Organisasi sejenis PGRI yang anti PKI, seperti (PERGANU), (IGM), (PERGUKRI).

5) KONGRES PGRI VIII(10 - 24 Desember 1956 di Bandung)

Dilaksanakan 10 - 24 Desember 1956 di Bandung.

Tabel 1.6
Struktur Kepengurusan PGRI VIII

| Jabatan | Nama |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Ketua umum | ME. Soebadinata |
| Ketua | 1. Soedjono 2. M. Hoesein |
| Panitera umum | 1. Soebandri 2. Widodo |
| Panitera organisasi | Soekandri |
| Panitera perburuhan | Alamsjahroeddin |
| Panitera pendidikan | Idris M. Hutapea |
| Panitera keuangan | A. Zachri |
| Panitera sosial/ekonomi | A. Harahap |
| Komisaris umum | 1. Nj. S. Soenardi 2. P.J. Karamoy |

6) KONGRES PGRI IX (31 Oktober - 4 November 1959)

Diselenggarakan di Surabaya.

Tabel 1.7
Struktur Pengurus Besar PGRI V

| Jabatan | Nama |
|----------------------------------|------------------|
| Ketua umum | ME. Soebadinata |
| Ketua | M. Hoesein |
| Panitera umum | Soekarno Prawira |
| Panitera umum dan Keuangan | A. Zachari |
| Panitera perburuhan | Moejono |
| Panitera pendidikan | L. Manusama |
| Panitera | A. Zachri |
| Panitera Organisasi | Moersid Idris |
| Panitera sosial/ekonomi | Ismartojo |
| Komisaris Umum Urusan Pendidikan | A.H. Arahap |
| Komisaris Umum Urusan Perburuhan | Alam Sjahroeddin |
| Komisaris umum Urusan Keuangan | Nj. S. Soenardi |

Masa ini kepengurusan PB PGRI mengalami kesulitan dana, karena

banyak iuran dari cabang-cabang Jawa Timur dan Jawa Tengah yang terhambat, akibat penarikan sepihak oleh golongan PKI di daerah tersebut.

KONGRES PGRI X

Stadion Gelora Bung Karno yang terletak di Jakarta di jadikan sebagai venue pada bulan oktober. Struktur kepengurusan yakni:

Tabel 1.8

| |
|------------------------------|
| Ketua Umum : M.E.Subiadinata |
| Ketua I : M.Hosein |
| Ketua II : Soebandri |

Soebandri diberhentikan dari jabatan karena ikut mendirikan PGRI Non Vaksentral/PKI. Setelah mengalami beberapa *reshuffle*, maka tersusun PB PGRI:

Tabel 1.9

| |
|------------------------------|
| Ketua Umum : M.E,Subiadinata |
| Ketua I : M.Hosein |
| Ketua II |

D. Kesimpulan

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam revolusi di bidang pendidikan di awal Indonesia merdeka menyangkut penyesuaian dengan cita-cita dari suatu Bangsa dan Negara Merdeka. P3 yang di ketuai oleh Ki Hadjar Dewantara telah berhasil merumuskan landasan idiil yang diambil dari falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila. Hasil lainnya adalah ketetapan dalam merumuskan tujuan pendidikan nasional, sistem sekolah serta kesempatan belajar bagi rakyat Indonesia. Mengenai tujuan pendidikan dirumuskan bahwa, pendidikan bertujuan mengajar WN yang baik, bersedia memberikan tenaga serta pikiran untuk Negara.

Pada awal kemerdekaan, pendidikan Indonesia lebih menekankan kepada bagaimana menanamkan rasa nasionalisme dan berjiwa patriotisme untuk mempertahankan kemerdekaan. Terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia adalah hasil dari perjuangan guru-guru Indonesia. Perjuangan Guru telah dimulai dari

masa Hindia Belanda dengan adanya organisasi Persatuan Guru Hindia Belanda pada tahun 1912. Persatuan Guru Hindia Belanda kemudian mengalami perubahan menjadi Persatuan Guru Indonesia pada tahun 1932. Pada 23-25 November 1945 digelaran KG, yang menghasilkan Persatuan Guru Republik Indonesia.

Dalam situasi perjuangan rakyat melawan sekutu, guru-guru mengadakan kongres yang dilaksanakan di Sekolah Guru Puteri (SGP) gedung Van De Vanter, sekarang SMP 3 Surakarta Jawa Tengah. Sebagai penggerak dan pemimpin adalah Amin Singgih dan Rh. Koesnan. Kongres dilaksanakan dari tanggal 23 sampai 25 November 1945. Hasil kongres tersebut adalah guru-guru sepakat untuk membentuk suatu organisasi yang bisa mewadahi aspirasi dan perjuangan guru untuk kemajuan bangsa Indonesia. Atas usulan dari Persatuan Guru Seluruh Perianan (PGSP) dari Jawa Barat yang mengusulkan nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Seluruh peserta kongres sepakat dan menyetujui berdirinya suatu organisasi yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Setelah terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Guru Republik Indonesia terus berjuang menggalang persatuan dengan mengajak guru-guru di daerah untuk bergabung kedalam PGRI. Namun, perjuangan itu tidaklah mudah karena mendapat rintangan dari pihak Belanda. Persatuan Guru Republik Indonesia merasa bangga dikarenakan Rh. Koesnan diangkat menjadi Menteri Perhubungan dan Sosial dalam kabinet Moh. Hatta. Peran Guru Republik Indonesia pada masa Revolusi Indonesia adalah ikut merumuskan tujuan Pendidikan Indonesia, serta meletakkan dasar bagi pendidikan yaitu dijadikannya Pancasila sebagai landasan ideologi Pendidikan Indonesia.

Daftar Referensi

- Persatuan Guru Republik Indonesia. 2012. *Pendidikan Sejarah Perjuangan dan Jati Diri PGRI*. Jakarta: YPLP/PPLP PGRI Pusat
- Hadiatmadja, R.A. Soepardi., dkk., 2000. *Pendidikan sejarah perjuangan PGRI (PSP- PGRI)*, Jilid II, III, IV, V. Semarang : IKIP PGRI
- Rakhmat Hidayat, 2011. *Dinamika Sosial Gerakan Guru di Indonesia*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta
- Sulistiyono. (2013). Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia. www.pgri.or.id
- Dadang Supardan. (2008). *Menyingskap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis*. 1 (2) 96-106
<https://unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/download/6941/591>
- Ahmad Kosasih. (2016). *Perjuangan Organisasi Guru Di Masa Revolusi Sejarah PGRI Di Awal Pendiannya*. Bandung : Universitas Indraprasta PGRI. 91-103.
https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/download/916/852.